

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1946.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi kebudayaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Panjaitan Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Rocky Marbun, *Cerdik dan Teknis Menghadapi Kasus Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta Selatan, 2010.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Jurnal

Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dilembaga Pemasarakatan Purwekerto, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta, 2012.*

Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Sumatera Utara, 2017.*

Silvia Chandra Dewi, *Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007.*

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pertimbangan Pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagian C.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.